



DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Nandila Feby Izami¹, Farida², Anissa Hakim Purwantini³

Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

febyizami@gmail.com¹, farida_feb@unimma.ac.id², anissahakimp@unimma.ac.id³

Abstrak

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Kabupaten Magelang bisa ditingkatkan melalui program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui opini laporan keuangan. Pada instansi pemerintah, pelaporan keuangan adalah perwujudan dari akuntabilitas kinerja karena laporan keuangan salah satu pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas manajemen sumber daya dan implementasi kebijakan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang merupakan objek riset dengan teknik purposive sampling. Kualifikasi sampel yaitu pegawai dengan masa kerja minimal satu tahun dan menjalankan fungsi akuntansi atau penatausahaan keuangan. Alat uji menggunakan Structural Equation Modeling- Partial Least Squares. Hasil studi mengungkapkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan. Meskipun begitu, kualitas laporan keuangan tetap berkontribusi meningkatkan akuntabilitas kinerja, namun tidak berperan sebagai mediasi antara kompetensi SDM, SAPD, SPI dengan akuntabilitas kinerja.. Implikasi penelitian yaitu mendorong penerapan pengoptimalan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabilitas kerja di pemerintah daerah.

Keywords: Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja

Abstract

The Performance Accountability Value of Government Agencies in the Magelang Regency Government can be improved through programs that support the achievement of strategic objectives, namely by increasing government performance accountability through financial statement opinions. In government agencies, financial reporting is a manifestation of performance accountability because financial statements are one of the government's responsibilities to the people for resource management and policy implementation. The Regional Apparatus Organizations of Magelang Regency were the object of research using purposive sampling techniques. The sample qualifications were employees with a minimum of one year of service and who performed accounting or financial administration functions. The test tool used was Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. The results of the study reveal that the competence of Human Resources, Local Government Accounting Systems, and Internal Control Systems do not have an impact on the quality of financial reports. Even so, the quality of financial reports still contributes to improving performance accountability, but does not act as a mediator between the human resource competencies, SAPD, SPI and performance accountability. The implications of this research are to encourage the implementation of optimized quality financial reports and work accountability in local government.

Keywords: Financial Statement Quality, Performance Accountability

(*) Corresponding Author: Farida, farida_feb@unimma.ac.id, 085643357645

INTRODUCTION

Reformasi birokrasi suatu pemerintahan mampu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja sebagai wujud implementasi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kesuksesan dari program kepada pemangku kepentingan secara terukur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yang tercantum dalam laporan kinerja secara berkala.

Pemerintah menerapkan sistem pertanggungjawaban yang memiliki kejelasan, ketepatan dan keteratutan untuk menjaga akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP ditujukan agar pelaksanaan kebijakan dan pembangunan pemerintah berhasil sesuai tujuan. SAKIP adalah bagian instrumen dalam mengimplementasikan konsep *good government*. SAKIP mengintegrasikan mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, pengawasan dan juga evaluasi.

Tabel 1

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Magelang

No.	Tahun	AKIP	Predikat
1	2019	60,10	B
2	2020	60,33	B
3	2021	61,13	B
4	2022	62,25	B
5	2023	63,04	B
6	2024	63,57	B

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2024.

Pada tahun 2019-2024, nilai AKIP pada Pemerintah Kabupaten Magelang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan predikat nilai B. Predikat B menggambarkan bahwa AKIP dalam kategori baik artinya 1/3 unit kerja utama telah berjalan sesuai ketetapan tetapi diperlukan pengelolaan dan perbaikan kembali dalam pencapaian tujuan dan pengelolaan yang baik. Selain itu, predikat B menunjukkan pengukuran kinerja tercermin pada level eselon 2 unit kerja. Target nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Magelang pada akhir RPMJD tahun 2024 yaitu 71,00 dengan predikat BB. Nilai AKIP pada Pemerintah Kabupaten Magelang masih dapat ditingkatkan melalui program yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Salah satu perwujudan dari program yang mendukung pencapaian sasaran strategis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu opini laporan keuangan.

Ada hal-hal yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (KuLk), yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). KSDM menekankan pada indikator keilmuan, keterampilan pegawai, perilaku etis, dan pengalaman dalam menunjang pekerjaan secara efektif (Wirawan, 2009). Dengan adanya kompetensi tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai penunjang tugas khususnya pembuatan laporan keuangan. Goo (2022), Iqbal dkk. (2022) serta Putri & Bayu (2022) menyatakan bahwa KSDM yang berkualitas mampu menaikkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Sedangkan Animah dkk. (2020) dan Putri dkk. (2020) menjelaskan kompetensi tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan, Aswandi (2018) menyatakan bahwa kompetensi yang tinggi justru menurunkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, terdapat faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

SAPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 yaitu susunan terstruktur mulai dari tata cara, penyelenggara, instrumen, dan elemen lain untuk mengimplementasikan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang handal. Jika sistem akuntansi terlaksana dengan baik, laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, sehingga hasil dari SAPD yang berkualitas. Fatimah & Indrawati (2022), Slamet & Irmadiani (2022) dan Kusumawaty & Septariani (2022) menyatakan penerapan sistem akuntansi pemerintahan mampu menjaga kualitas laporan keuangan. Sedangkan Dewata dkk. (2021) dan Mustika & Fadilah (2021) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan. Jultri & Made (2021) menemukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dianggap unggu

justru menurunkan kualitas laporan keuangan. Aspek lain yang menentukan kualitas laporan keuangan Sistem Pengendalian Internal.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan dengan tingkat keefektifan dan didukung efisiensi, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan aset negara, dan kepatuhan. Goo (2022), Putri & Bayu (2022), Mispa & Nuramal (2022), serta Putri dkk. (2020) menyatakan sistem pengendalian internal bisa menaikkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Fatimah & Indrawati (2022) mendeskripsikan sistem pengendalian internal tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan, Zamzami & Gowon (2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang baik akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengembangkan dari (Manik & Nafsiah, 2023) mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang. Ketidaksamaan mendasar dari penelitian tersebut adalah **pertama**, menambahkan variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. **Kedua**, menambahkan mediasi variabel kualitas laporan keuangan pada akuntabilitas kinerja. **Ketiga**, objek penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang karena adanya kelemahan pengendalian internal sehingga nilai AKIP dari tahun 2019-2014 memperoleh predikat B yang menandakan bahwa masih perlu adanya pengelolaan yang lebih baik pada unit kerja dan tanggung jawab manajemen kinerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus penelitian adalah pada pengujian aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan menguji sejauh mana kualitas laporan keuangan menjembatani pengaruh tersebut pada akuntabilitas kinerja.

LITERATURE REVIEW

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* yaitu teori yang mendeskripsikan keadaan manajemen dalam memprioritaskan kepentingan Perusahaan bukan (Donaldson et al., 1991). Dasar teori adalah sosiologi dan psikologi, di mana para eksekutif bertindak sebagai *steward*.

Akuntabilitas Kinerja (AKn)

PP Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggungjawab dari tata kelola sumber daya, implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja diartikan dengan implementasi tanggungjawab instansi pemerintah untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanaan rencana kepada pemangku kepentingan sesuai sasaran kinerja yang terlihat pada laporan kinerja secara berkala, sehingga indikator dari akuntabilitas ini terdiri dari aspek kejujuran, hukum, akuntabilitas (proses, program dan kebijakan).

Kualitas Laporan Keuangan (KuLK)

PP Nomor 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif berfungsi sebagai standar atau pedoman normatif untuk informasi yang ada pada laporan keuangan, dan sangat penting untuk membantu mencapai tujuan akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah diukur dengan 4 faktor diantaranya relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan pegawai Aparatur Sipil Negara , yang meliputi ilmu pengetahuan, keahlian yang dimiliki, dan tindakan dalam menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi, berdaya guna, dan berhasil guna.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah/SAPD sebagai susunan secara sistematis tentang prosedur, penyelenggaraan, dan elemen lain untuk menjalankan fungsi akuntansi dengan benar dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan pada pemerintah daerah. Pelaporan yang akurat ini meliputi beberapa indikator yaitu dari proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta proses dan output pelaporan yang tertuang pada laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Mulyadi (2017), pengendalian internal diartikan metode dalam mencapai tujuan tertentu oleh orang-orang dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian tujuan tersebut terkait laporan keuangan dan kepatuhannya. PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah sistem terintegrasi yang dilakukan secara kontinyu oleh semua pihak di organisasi untuk mencapai tujuan, dengan memastikan kinerja efektif, laporan keuangan andal, aset aman, dan kepatuhan hukum.

METHODS

Kategori penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang. Metode penyampelan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun parameter penentuan sampel yaitu pegawai dengan masa kerja minimal satu tahun dan pegawai bidang akuntansi atau penatausahaan keuangan. Cara pengumpulan data yaitu melalui kuesioner kepada semua responden. Alat analisis menggunakan *Structural Equation Modeling- Partial Least Squares* (SEM-PLS).

RESULTS & DISCUSSION

Results

1. Sampel Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 98 dan kembali 85 kuesioner. Dari 85 kuesioner, tersebut responden yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 35 kuesioner (35,71%). Responden yang tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel karena amsa kerja kurang dari 1 tahun dan tidak menjalankan fungsi akuntansi atau penatausahaan keuangan pada OPD di Kabupaten Magelang.

2. Hasil Outer Model

a. Validitas

Uji validitas dalam SEM-PLS terdiri dari dua jenis, yaitu validitas dan validitas diskriminan. Hasil indikator validitas konvergen memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0.70, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen seperti tertuang pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Outer Loadings

VARIABEL	KSDM	SAPD	SPI	KLK	AK
KSDM1	0.909				
KSDM2	0.767				
KSDM3	0.948				
KSDM4	0.819				
KSDM5	0.905				
SAPD2		0.845			
SAPD3		0.880			
SAPD4		0.929			
SAPD5		0.886			
SPI1			0.771		
SPI2			0.788		
SPI3			0.727		
SPI4			0.727		
SPI6			0.794		
SPI7			0.824		
SPI9			0.749		
SPI10			0.761		
KuLK1				0.858	
KuLK2				0.788	

KuLK3				0.965	
KuLK4				0.928	
KuLK5				0.899	
KuLK6				0.844	
KuLK7				0.876	
KuLK8				0.716	
AKn2					0.832
AKn3					0.845
AKn4					0.906
AKn5					0.871
AKn6					0.810
AKn7					0.827
AKn9					0.772
AKn10					0.912
AKn11					0.734

Sumber: Data olah, 2025

Aspek lain dari nilai *loading factor*, validitas konvergen juga terlihat dari nilai Average *Variance Extracted* ((AVE)). Dari tabel 3, nilai AVE variabel > 0.50, sehingga indikator variabel memenuhi kriteria validitas konvergen. Tampilan tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

AVE	KSDM	SAPD	SPI	KLK	AK
0.761	0.784	0.590	0.744	0.699	

Sumber: Data olah, 2025

Tujuan validitas diskriminan adalah membedakan konstruk laten agar tidak saling tumpang tindih, dan di SmartPLS, hal ini diverifikasi lewat kriteria Fornell-Larcker serta cross loadings, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk unik dan berbeda dari yang lain. Berdasarkan Tabel 4, uji validitas diskriminan berhasil karena akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari korelasi antar variabel, menunjukkan setiap variabel benar-benar berbeda dan memiliki validitas diskriminan yang baik

Tabel 4. Nilai Fornell-Larcker Criterion

VARIABEL	KSDM	SAPD	SPI	KLK	AK
KSDM	0.872			0.605	0.679
SAPD	0.787	0.886		0.635	0.637
SPI	0.646	0.742	0.768	0.621	0.766
KLK				0.862	0.759
AK					0.836

Sumber: Data olah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, nilai yang dihasilkan oleh seluruh indikator lebih tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator pada konstruk lainnya, sehingga bisa dikatakan indikator sesuai kriteria validitas diskriminan. Indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, mampu menjadi variabel manifes yang valid bagi konstruknya.

Tabel 5. Nilai Cross Loadings

	KSDM	SAPD	SPI	KLK	AK
KSDM1	0.909	0.756	0.606	0.545	0.601
KSDM2	0.767	0.534	0.380	0.399	0.378
KSDM3	0.948	0.792	0.623	0.614	0.706
KSDM4	0.819	0.550	0.622	0.488	0.578
KSDM5	0.905	0.750	0.547	0.559	0.634
SAPD2	0.571	0.845	0.559	0.514	0.410
SAPD3	0.684	0.880	0.678	0.548	0.626
SAPD4	0.699	0.929	0.671	0.512	0.567

SAPD5	0.800	0.886	0.700	0.654	0.619
SPI1	0.547	0.521	0.771	0.458	0.584
SPI2	0.535	0.587	0.788	0.610	0.564
SPI3	0.451	0.613	0.727	0.469	0.442
SPI4	0.478	0.550	0.794	0.314	0.452
SPI6	0.525	0.588	0.824	0.538	0.568
SPI7	0.479	0.525	0.794	0.487	0.636
SPI9	0.501	0.601	0.824	0.474	0.734
SPI10	0.451	0.584	0.749	0.417	0.658
KuLK1	0.550	0.555	0.577	0.858	0.713
KuLK2	0.478	0.509	0.435	0.788	0.498
KuLK3	0.602	0.630	0.555	0.965	0.763
KuLK4	0.549	0.566	0.536	0.928	0.665
KuLK5	0.552	0.550	0.484	0.899	0.688
KuLK6	0.450	0.604	0.548	0.844	0.565
KuLK7	0.538	0.573	0.636	0.876	0.700
KuLK8	0.433	0.368	0.493	0.716	0.598
AKn2	0.562	0.503	0.577	0.723	0.832
AKn3	0.470	0.525	0.652	0.486	0.845
AKn4	0.570	0.579	0.768	0.623	0.906
AKn5	0.607	0.482	0.558	0.736	0.871
AKn6	0.549	0.421	0.600	0.513	0.810
AKn7	0.577	0.578	0.808	0.638	0.827
AKn9	0.446	0.509	0.588	0.360	0.772
AKn10	0.656	0.609	0.703	0.818	0.912
AKn11	0.629	0.572	0.466	0.696	0.734

Sumber: Data olah, 2025

b. Reliabilitas

Besaran *cronbach's alpha* dari variabel yaitu > 0.60 . Hal tersebut menandakan indikator dianggap reliabel. Besarnya *composite reliability* > 0.70 . Artinya, indikator memiliki konsistensi yang tinggi untuk mengukur konstruknya seperti tampak ditabel 6.

Tabel 6. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	KSDM	SAPD	SPI	KLK	AK
<i>Cronbach's alpha</i>	0.920	0.909	0.901	0.950	0.946
<i>Composite reliability</i>	0.941	0.936	0.920	0.958	0.954

Sumber: Data yang diolah, 2025

3. Uji Model Struktural

a. Hasil Koefisien Jalur

Hasil uji koefisien jalur menunjukkan variable kompetensi sumber daya manusia, system akuntansi pemerintah daerah, system pengendalian internal tidak memiliki efek pada kualitas laporan keuangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dihasilkan oleh kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut tertuang di tabel 7.

Tabel 7. Nilai Path Coefficients

Hubungan	Koefisien	P Values	Keterangan
KSDM → KLK	0.230	0.296	H ₁ tidak diterima
SAPD → KLK	0.239	0.376	H ₁ tidak diterima
SPI → KLK	0.302	0.313	H ₁ tidak diterima
KLK → AKn	0.427	0.062	H ₄ diterima

Sumber: Data yang diolah, 2025

b. Hasil Uji Mediasi

Hasil uji mediasi melalui pengaruh langsung dan tidak langsung. Hasil koefisien jalur *indirect* bernilai positif dan nilai *P value* > 0,10. Hasil koefisien pengaruh langsung/*direct* menghasilkan nilai koefisien>pengaruh tidak langsung, sehingga variable kualitas laporan keuangan tidak dapat memediasi hubungan tersebut. Hasil uji mediasi tertuang pada tabel 8.

Tabel 8. Nilai Specific Indirect-Direct Effects

Hubungan	Koefisien	P Values	Keterangan
Nilai Indirect Effect			
KSDM → KLK → AKn	0.098	0.405	H ₅ tidak diterima
SAPD → KLK → AKn	0.098	0.529	H ₆ tidak diterima
SPI → KLK → AKn	0.129	0.483	H ₇ tidak diterima
Nilai Direct Effect			
KSDM → AKn	0.270	0.037	Pengaruh langsung-positif
SAPD → AKn	-0.198	0.318	Tidak berpengaruh
SPI → AKn	0.474	0.063	Pengaruh langsung-positif

Sumber: Data yang diolah, 2025

Pada variable kompetensi sumber daya manusia (KSDM) secara *indirect* nilai *P value* sebesar $0.405 > 0.10$ dan hasil koefisien *direct* > *indirect* yaitu $0,270 > 0,098$. Temuan ini menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memediasi hubungan kompetensi SDM, SAPD, maupun SPI terhadap akuntabilitas kinerja.

DISCUSSION

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan tidak didukung oleh tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia. Alasanya dikarenakan kurangnya kualitas dalam memahami kualitas pelaporan keuangan Animah dkk. (2020), sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki (Lestari Utami & Erwati, 2023). Hasil tersebut tidak selaras dengan teori *stewardship* yaitu pemerintah berusaha mencapai kepentingan organisasi dan bertindak dengan cara yang terbaik, sehingga perlu meningkatkan kompetensi agar tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik.

Selaras dengan (Lestari Utami & Erwati, 2023) (Manik & Nafsiah, 2023) Animah dkk. (2020) dan Putri dkk. (2020) bahwa KSDM tidak memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan Goo (2022), Iqbal dkk. (2022), dan Putri & Bayu (2022) bahwa KSDM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Kualitas Laporan Keuangan

Hasil menjelaskan bahwa sistem akuntansi pada pemerintah daerah tidak memberikan efek pada kualitas laporan keuangan. Mustika & Fadilah (2021) staf keuangan belum memiliki keterampilan lebih dalam menerapkan standar yang ditetapkan dalam membuat laporan keuangan. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori *stewardship* karena SAPD, belum dilaksanakan dengan optimal khususnya pada pengakuan aset, kewajiban yang dimiliki dan ekuitas pemerintah. Penelitian selaras dengan Dewata dkk. (2021) dan Mustika & Fadilah (2021) yaitu SAPD tidak memiliki efek pada kualitas laporan keuangan. Namun, berbeda dengan Fatimah & Indrawati (2022), Kusumawaty & Septariani (2022), dan Slamet & Irmadiani (2022) bahwa SAPD mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Internal tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan. Fatimah & Indrawati (2022) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal OPD di Indoensia belum maksimal dalam menjalankan fungsinya khususnya penilaian risiko belum dilaksanakan dengan baik. Hasil sejalan dengan Fatimah & Indrawati (2022) yang mendeskripsikan tentang kualitas laporan keuangan tidak

didukung oleh Sistem Pengendalian Internal. Berbeda dengan (Manik & Nafsiah, 2023), (Lestari Utami & Erwati, 2023) Goo (2022), Putri & Bayu (2022), dan Mispa & Nuramal (2022) yaitu Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak yang tinggi pada peningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

4. Kualitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja yang baik dipengaruhi oleh besarnya kualitas laporan keuangan. Maknanya bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi dan memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan akan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja organisasi. Dan akuntabilitas kinerja salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah dipercaya masyarakat untuk melakukan tugas dan fungsinya termasuk dalam bidang tata kelola keuangan negara yang dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Hasil penelitian sejalan dengan Sari & Nurlaila (2022), Novrizmi (2022), dan Wiguna dkk. (2021) yang bahwa semakin berkualitas laporan keuangan akan menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik. Tetapi, berbeda dengan Suwardana (2021) bahwa akuntabilitas tidak dipengaruhi kualitas laporan keuangan.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Kinerja dengan Mediasi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan tidak memiliki efek mediasi kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja. Safira dkk. (2022) mendeskripsikan jika akuntabilitas kinerja dipengaruhi secara langsung oleh kompetensi Sumber Daya Manusia, sehingga tanpa harus melewati kualitas laporan keuangan. Kemampuan pada Sumber Daya Manusia mencakup gabungan dari wawasan kognitif, keterampilan teknis, dan etika perilaku yang dimiliki seseorang yang mendukung aspek kejujuran, kepatuhan hukum, keahlian, dan perilaku dalam melakukan pekerjaannya sehingga akuntabilitas organisasi juga meningkat.

6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Akuntabilitas Kinerja dengan Mediasi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan tidak berperan sebagai perantara antara Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki efek secara langsung pada akuntabilitas kinerja, seperti yang dinyatakan oleh Hanifa (2018). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola keuangan negara. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai sarana pemerintah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

7. Sistem Pengendalian Internal pada Akuntabilitas Kinerja dengan Mediasi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan tidak dapat memediasi Sistem Pengendalian Internal dengan akuntabilitas kinerja. Manullang & Abdullah (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang berkualitas akan menaikkan fungsi akuntabilitasnya. Pemerintah berupaya dalam kesuksesan mencapai tujuan organisasi, sehingga dibutuhkan Sistem Pengendalian Internal agar efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Jika pemerintah ingin mempertanggungjawabkan kinerja yang mumpuni, diperlukan dukungan dari pengendalian internal yang berkualitas agar tujuan organisasi tercapai.

CONCLUSION

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa poin berikut ini:

1. Meskipun kompetensi SDM, sistem akuntansi, dan SPI tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi laporan keuangan berkualitas tetap meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. Kualitas laporan keuangan tidak berperan sebagai mediasi yang menghubungkan Kompetensi SDM, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pengendalian internal pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan pegawai di unit Satuan Pengawas Internal (SPI) karena berhubungan dengan pengawasan laporan keuangan dan menambah variable lain seperti ketataan terhadap aturan dan kejelasan sasaran anggaran

REFERENCES

- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109.
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Dewata, E., Jauhari, H., & el Auda, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 44–53.
- Donaldson, L., Scoorman, F. D., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory*.
- Fatimah, S., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 539–553.
- Goo, E. E. K. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sika. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 1 (3), 393–408.
- Hanifa, L. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Sapd) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 4(2), 70–77.
- Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(1), 1–15.
- Jultri, A., & Made, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan New Public Management terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol 9 No 1.
- Kusumawaty, M., & Septariani, J. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Musi Banyuasin). *JETAP*, 2(2), 85–105.
- Manik, S. A., & Nafsiah, S. N. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Volume 20 No 3. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonometika/index>
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 62–73.
- Mispa, S., & Nuramal, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 256–266.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mustika, M., & Fadilah, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 567–571.
- Novrizmi, V. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. *Journal Scinetific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 3(7), 870–874.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putri, P. G. A. M. G., & Bayu, P. C. G. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 241–251.
- Putri, U. A., Hafidhah, H., & Firmansyah, I. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Opd Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 11–19.
- Safira, F., Sari, K. R., & Aryani, Y. A. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Journal Scinetific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 3(7), 1116–1133.
- Sari, A. P., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(2), 172–181.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 67–80.
- Suwardana, B. P. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo).
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 106–125.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.
- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 136–148.